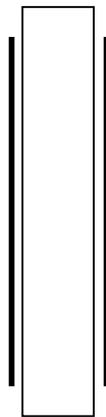


TERBATAS

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER VI/MULAWARMAN

KARANGAN MILITER

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BAKTI TNI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DARAT



Oleh :

Nama : Tang upe
Pangkat/Corp : Lettu Cpl
NRP : 11050023700479
Satuan : Paldam VI/Mulawarman

TA. 2011

TERBATAS

TERBATAS

ABSTRAKSI

Bakti TNI sebagai salah satu metoda Binter merupakan pelibatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dalam membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan untuk menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait dan atau inisiatif sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat tanpa mengabaikan kesiapan satuan. Disamping itu Bakti TNI juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh TNI AD. Komando Kewilayahan sebagai ujung tombak TNI AD dalam melaksanakan pembinaan teritorial melalui pemberdayaan wilayah pertahanan yang implementasinya di lapangan diwujudkan dengan kegiatan Bakti TNI baik berupa kegiatan Karya Bakti maupun Operasi Bakti ditujukan untuk membantu pemerintah dalam menggali potensi yang ada di wilayah guna kepentingan pertahanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dalam lingkup internal TNI AD sendiri melalui Bakti TNI diharapkan akan terwujud kemanunggalan TNI – Rakyat.

Implementasi di lapangan dalam mengelola potensi wilayah melalui kegiatan Bakti TNI dimana Kowil menjadi tulang punggung dan pelaksanaannya pada kenyataannya belum mencapai hasil sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan, mengingat Kowil masih menghadapi berbagai permasalahan yang menyangkut kesiapan aparatur Kowil yang belum memadai, penyelenggaraan Bakti TNI dalam setiap tahapan yang belum sesuai dengan ketentuan, tidak adanya dukungan peranti lunak serta belum maksimalnya kegiatan koordinasi lintas sektoral yang dilakukan aparat Kowil dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

Bakti TNI sebagai salah satu metode Pembinaan Teritorial merupakan sarana yang efektif untuk mendukung tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat, sehingga penyelenggaraannya perlu lebih dioptimalkan. Oleh karena itu guna terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan Bakti TNI sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat di masa yang akan datang, rumusan upaya dan langkah-langkah pengembangan yang menyangkut peningkatan kesiapan aparatur Kowil, penyelenggaraan Bakti TNI dalam setiap tahapan, penyusunan buku-buku petunjuk serta peningkatan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bakti TNI dengan Pemerintah dan instansi sektoral lainnya melalui kerjasama lintas sektoral TNI dengan Departemen/Non Departemen mutlak untuk dapat dilakukan, sehingga kegiatan Bakti TNI sebagai upaya TNI AD untuk membantu pemerintah

TERBATAS

dalam menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan diharapkan dapat lebih meningkatkan kemandirian TNI – Rakyat.

Selain itu melalui upaya-upaya tersebut diharapkan Satuan Kowil sebagai garda terdepan TNI AD memiliki kemampuan yang optimal dalam menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI dalam rangka mewujudkan kekuatan kewilayahan berupa kesiapan wilayah untuk menghadapi berbagai hakekat ancaman sehingga terwujudnya suatu kondisi juang yang tangguh dan bersumber dari segenap potensi wilayah nasional bagi kepentingan pertahanan negara, yakni terpeliharanya wilayah nasional dan “tata ruangnya” serta “terkelolanya sumber daya alam dan buatan” dan “sumber daya manusia” dalam suatu sistem bela negara serta terwujudnya wilayah juang yang tangguh untuk menunjang sistem pertahanan semesta sehingga pemberdayaan wilayah pertahanan matra darat dapat dilaksanakan secara optimal.

TERBATAS
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karangan militer dengan judul **“OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BAKTI TNI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DARAT”**. Ketertarikan penulis untuk menyusun naskah dengan topik bahasan tersebut diatas, karena dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Profesionalisme TNI dalam menjaga keselamatan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihadapkan dengan perkembangan situasi era globalisasi saat ini yang sangat rentang akan timbulnya ancaman, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam negeri. Atas dasar tersebut, Penulis berpendapat bahwa salah satu solusi untuk mengatasi kemungkinan ancaman tersebut adalah dengan melaksanakan Bakti TNI secara optimal guna mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh dalam rangka pertahanan negara, dimana salah satu syarat yang sangat penting adalah kemampuan Komandan Kodim yang baik dan lengkap.

Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Senior, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan. Demikian juga kepada Isteri saya tercinta karena dengan dorongan moril mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan karangan militer ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sumbangan pikiran yang konstruktif baik berupa saran, pendapat maupun kritikan demi kesempurnaan karangan militer ini.

Balikpapan, Maret 2011
P e n u l i s

TERBATAS

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BAKTI TNI
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN WILAYAH
PERTAHANAN DARAT**

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstraksi	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Umum.	1
2. Maksud dan Tujuan.	2
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.	2
4. Metode dan Pendekatan.	2
5. Pengertian	3
BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN	
6. Umum.	5
7. Landasan Pemikiran.	5
8. Dasar Pemikiran	8
BAB III PENYELENGGARAAN BAKTI TNI SAAT INI	
9. Umum.	10
10. Penyelenggaraan Bakti TNI.	10
11. Piranti Lunak.	13
12. Keterpaduan Pelaksanaan Bakti TNI.	14
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH	
13. Umum.	16
14. Faktor Internal.	16
15. Faktor Eksternal.	18

TERBATAS

BAB V	PENYELENGGARAAN BAKTI TNI YANG DIHARAPKAN	
	16. Umum.	23
	17. Penyelenggaraan Bakti TNI.	21
	18. Piranti Lunak.	24
	19. Keterpaduan Pelaksanaan Bakti TNI.	25
BAB VI	OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BAKTI TNI	
	20. Umum	27
	21. Tujuan	27
	22. Sasaran.	28
	23. Subyek.	28
	24. Obyek.	32
	25. Metoda.	33
	26. Sarana dan Prasarana.	34
	27. Upaya yang dilaksanakan.	35
BAB VII	PENUTUP	
	28. Kesimpulan.	45
	29. Saran.	46

Lampiran-Lampiran

1. Lampiran-A (PROPOSISI)
2. Lampiran-B (POLA PIKIR)
3. Lampiran-C(DAFTAR PUSTAKA)
4. Lampiran-D (DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

TERBATAS

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BAKTI TNI
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN WILAYAH
PERTAHANAN DARAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Komando Kewilayahan sebagai ujung tombak TNI AD dalam melaksanakan pembinaan teritorial tetap melaksanakan langkah-langkah kongkrit melalui pemberdayaan wilayah pertahanan yang implementasinya di lapangan diwujudkan dengan kegiatan Bakti TNI baik berupa kegiatan Karya Bakti maupun Operasi Bakti dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menggali potensi yang ada di wilayah guna kepentingan pertahanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dalam lingkup internal TNI AD sendiri melalui Bakti TNI diharapkan akan terwujud kemanunggalan TNI – Rakyat.

b. Dalam kenyataannya penyelenggaraan Bakti TNI yang dilaksanakan oleh Kowil masih banyak menemui kendala dan keterbatasan antara lain rendahnya tingkat kesiapan aparat Kowil, terbatasnya piranti lunak yang dimiliki baik berupa buku-buku petunjuk maupun protap, serta masih belum padunya rencana kegiatan Bakti TNI yang disusun oleh Kowil dengan pemerintah dan instansi terkait lainnya. Kondisi tersebut berakibat pada penyelenggaraan Bakti TNI belum optimal dan tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan Komando atas, sehingga tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat yang menjadi salah satu tugas TNI AD belum dapat tercapai.

TERBATAS

c. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka perlu disusun berbagai langkah dan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan Bakti TNI baik melalui peningkatan kesiapan aparat Kowil, penyusunan piranti lunak maupun peningkatan keterpaduan penyelenggaraan Karya Bakti dan Operasi Bakti dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya sehingga diharapkan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat dapat terwujud.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Maksud tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang optimalisasi penyelenggaraan Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

b. Tujuan. Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai bahan masukan dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan TNI AD dalam pengambilan kebijaksanaan dan strategi Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat sehingga dalam penyelenggaraannya dapat berjalan optimal.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Tulisan ini secara komprehensif membahas hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bakti TNI Kodim yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Latar belakang pemikiran.
- c. Penyelenggaraan Bakti TNI saat ini.
- d. Faktor-faktor yang Berpengaruh.
- e. Penyelenggaraan Bakti TNI yang diharapkan.
- f. Optimalisasi Penyelenggaraan Bakti TNI.
- g. Penutup.

4. Metoda dan Pendekatan. Karangan militer ini ditulis dengan menggunakan metode analisis dekritif serta melalui pendekatan empiris dan studi kepustakaan.

5. Pengertian.

a. **Optimalisasi.** Suatu upaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari keadaan semula¹.

b. **Bakti TNI.**

1) Pengertian umum. Bakti TNI adalah dharma Bakti TNI dalam perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Nasional².

2) Pengertian khusus. Bakti TNI adalah pelibatan TNI sebagai komponen utama pertahanan dalam membantu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (Civic Mission) untuk menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait tanpa mengabaikan kesiapan satuan³.

c. **Karya Bakti.** Karya Bakti adalah kegiatan satuan atau perorangan dalam penanganan masalah yang bersifat fisik maupun mental spiritual, dilaksanakan secara rutin atau inisiatif sendiri bersama masyarakat dalam rangka Bakti TNI untuk kepentingan masyarakat umum⁴.

d. **Operasi Bakti.** Operasi Bakti adalah partisipasi TNI sebagai alat pertahanan negara dalam rangka pembinaan wilayah di bidang fisik materiil dan mental spiritual, dilakukan atas perintah Panglima TNI dengan memanfaatkan tenaga, daya dan sarana dalam rangka Bakti TNI⁵.

¹ Yandianto, Drs. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, penerbit M2S Bandung, September 2001, Hal 393.

² Mabasad, *Buku Petunjuk Teknik tentang Bakti TNI*, Skep Kasad No. Skep/480/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004, Jakarta 2004, hal.4.

³ Ibid Hal. 5

⁴ Ibid Hal. 5

⁵ Ibid Hal. 5

e. Pertahanan Darat. Suatu bentuk dasar pertahanan dimana tekanan utama diletakkan pada dipertahankannya suatu medan tertentu dan pengharapan diletakkan pada pasukan yang ditempatkan melebar pada posisi dengan tembakan bantuan untuk menghentikan dan memukul penyerang⁶.

⁶ Mabasad, *Doktrin TNI AD, Kartika Eka Paksi*, Jakarta Desember 2001.

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. Umum. Bakti TNI merupakan salah satu wujud kepedulian TNI AD dalam membantu menangani permasalahan sosial dan kemanusiaan baik atas permintaan maupun atas inisiatif sendiri merupakan kekuatan bila diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan segenap lapisan masyarakat. Disamping itu Bakti TNI juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh TNI AD. Sebelum membahas lebih jauh tentang penyelenggaraan Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat, maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa landasan dan dasar pemikiran yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Bakti TNI.

7. Landasan Pemikiran.

a. Landasan Historis. Sejarah perjuangan Indonesia menunjukkan betapa kokohnya persatuan TNI dengan rakyat dalam kesatuan yang manunggal yang bangkit melancarkan revolusi untuk menumbangkan penjajahan. Oleh karena itu TNI akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat yang mendambakan keadilan dan kemakmuran, hal ini tentu akan terwujud melalui pembangunan yang merata ditengah-tengah rakyat. Pembangunan nasional yang menuju kepada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam konteks ini TNI selalu tampil kedepan menjadi pelopor, bersama-sama rakyat melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut melalui beberapa kegiatan misalnya Karya Bakti TNI, Operasi Bakti dan lain sebagainya. Dihadapkan dengan semangat Otonomi Daerah dan sejalan dengan adanya tugas pemberdayaan wilayah pertahanan, maka TNI dalam salah satu visinya antara lain berwawasan kebangsaan serta dicintai rakyat, oleh karena itu TNI berbakti dan mengabdikan hanya kepada bangsa

dan negara. TNI yang dicintai rakyat bermakna bahwa prajurit TNI harus manunggal dengan rakyat. Kemanunggalan TNI – Rakyat harus tetap dipertahankan sebagai modal utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan jalan mengintensifkan penyelenggaraan Bakti TNI sehingga pemberdayaan wilayah pertahanan dapat dilaksanakan secara optimal.

b. Landasan Idiil. Pancasila Sila ke-3 “Persatuan Indonesia” dan ke-5 “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan amanat yang harus dapat dilaksanakan oleh TNI AD untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kegiatan Bakti TNI merupakan salah satu bentuk pengejawantahan tugas-tugas TNI AD dalam bidang Binter untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c. Landasan Konstitusional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah atas dasar persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum. Pokok pikiran yang terkandung dalam pernyataan tersebut adalah bahwa Negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, sehingga akan terwujud kehidupan sosial yang kondusif. Dan untuk itulah, maka TNI AD berupaya untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Bakti TNI.

d. Landasan Konseptual.

- 1) Landasan Visional. Wawasan Nusantara sebagai landaan visional merupakan amanah yang harus diwujudkan karena ia merupakan prasyarat agar cita-cita nasional dapat terwujud. Wawasan Nusantara merupakan dasar pemikiran

dalam upaya untuk meningkatkan rasa kebangsaan serta kesadaran bela negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan Bakti TNI yang dilaksanakan oleh TNI AD merupakan wahana untuk menggalang kemanunggalan TNI – Rakyat sehingga akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat berdayaguna bagi kepentingan pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

2) Landasan Konsepsional. Ketahanan Nasional merupakan pedoman dalam menciptakan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk mewujudkan ketahanan nasional dimulai dari ketahanan pribadi, ketahanan lingkungan sampai dengan ketahanan nasional. Oleh sebab itu Ketahanan Nasional menjadi landasan pemikiran dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai tolok ukur terwujudnya wilayah pertahanan yang kuat. Dan oleh karenanya, Bakti TNI merupakan metode yang efektif untuk mengimplementasikan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan yang menjadi tugas TNI AD.

e. Landasan Operasional.

1) UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Didalamnya disebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman⁷. Dalam sistem pertahanan negara, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia dilindungi oleh sistem pertahanan negara yang kuat dengan melibatkan

⁷ Undang-undang RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4.

semua komponen bangsa. Dan untuk mewujudkan sistem pertahanan tersebut Komando Kewilayahan berperan sebagai wadah untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan, sehingga dapat mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh melalui pelaksanaan kegiatan Bakti TNI.

2) Undang – Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Didalamnya disebutkan bahwa TNI AD sebagai bagian integral dari TNI seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (d) memiliki tugas melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat⁸. Hal ini berarti TNI AD memiliki tanggung jawab untuk membina potensi kewilayahan guna kepentingan pertahanan di darat melalui pemberdayaan wilayah pertahanan. Untuk melakukan pembinaan potensi wilayah, maka TNI AD perlu mengoptimalkan kegiatan Bakti TNI di daerah.

8. Dasar Pemikiran.

a. Urgensi Pentingnya Bakti TNI dalam mewujudkan Kemanunggalan TNI - Rakyat. Binter dalam metode Bakti TNI pada intinya adalah merebut hati rakyat, oleh setiap prajurit Angkatan Darat dengan bersikap dan berperilaku baik terhadap rakyat dengan tujuan mengambil hati rakyat sehingga tumbuh simpati dan cinta terhadap tentaranya, yaitu Angkatan Darat guna mendorong terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat, suatu kondisi yang melahirkan kekuatan sinergis yang sangat diperlukan bagi upaya-upaya menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Semangat kemanunggalan TNI dan Rakyat itu memang harus dipertahankan dan bahkan harus terus dipupuk serta ditumbuhkembangkan dalam hati sanubari setiap prajurit TNI AD dan senantiasa akan menempatkan hati nurani rakyat pada tempat yang sentral dan suara hatinya kita dengarkan dengan baik. Dengan demikian, maka

⁸ Undang-undang RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 8 Ayat (d)

Bakti TNI sebagai upaya TNI AD untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan diharapkan dapat lebih meningkatkan kemanunggalan TNI – Rakyat.

b. Hubungan Bakti TNI dengan Pemberdayaan Wilayah Darat. Bakti TNI yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat tanpa mengabaikan kesiapan satuan. Sementara itu pemberdayaan wilayah pertahanan dengan melakukan serangkaian kegiatan pengelolaan potensi kewilayahan menjadi kekuatan kewilayahan untuk mendukung kepentingan pertahanan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pembinaan Teritorial metode Bakti TNI pada dasarnya untuk mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan serta pemberdayaan seluruh komponen bangsa di wilayah untuk kepentingan Sishanta. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Bakti TNI merupakan wahana untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BAKTI TNI SAAT INI

9. Umum. TNI merasa terpanggil untuk ikut berperan serta dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam pengelolaan potensi wilayah, baik dalam aspek geografi, demografi dan kondisi sosialnya dalam rangka tetap terjalinnya kemanunggalan TNI dan Rakyat. Implementasi di lapangan dalam mengelola potensi wilayah tersebut, TNI menerapkan pendekatan pembinaan teritorial dengan metoda Bakti TNI dimana Kowil menjadi tulang punggung dalam pelaksanaannya. Namun hasil yang dicapai selama ini belum sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan, mengingat penyelenggaraan Bakti TNI saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap purna manunggal serta kurangnya dukungan piranti lunak sehingga kegiatan koordinasi lintas sektoral yang dilakukan aparat Kowil dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya tidak optimal.

10. Penyelenggaraan Bakti TNI. Bakti TNI adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran bernegara serta bela negara dengan kegiatan membantu mengatasi kesulitan rakyat, memelihara dan memperbaiki fasilitas umum (jalan, tempat ibadah, air bersih dan lain-lain), membantu korban bencana alam (banjir, tanah longsor dan sebagainya) dan membina generasi muda melalui olah raga. Pelaksanaan Bakti TNI yang dilakukan oleh Satuan Kowil saat ini dirasakan masih kurang optimal.

a. Tahap Perencanaan. Pada tahap perencanaan perlu diketahui subyek, obyek, metode dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga tersusun dengan cermat namun saat ini belum dapat dilaksanakan terutama pada pelaksanaan kegiatan baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik dikarenakan pada perencanaan sasaran belum dilaksanakan seobyektif mungkin dengan memilih sasaran tidak melalui pengkajian yang mendalam dari aspek kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan melainkan

hanya memilih sasaran yang dapat dilaksanakan dengan waktu dan kemampuan yang tersedia.

b. Tahap Persiapan. Tahap persiapan seharusnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan namun saat ini persiapan untuk pelaksanaan Bakti TNI dilaksanakan secara mendadak setelah mendekati waktu yang ditentukan oleh PJO sehingga kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada persiapan tidak dilaksanakan di antaranya :

- 1) Rapat koordinasi yang seharusnya dilaksanakan ditingkat pusat oleh Dandim yang daerahnya ditetapkan menjadi obyek sasaran tidak dilaksanakan tetapi hanya menerima petunjuk agar mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) Penyiapan administrasi kegiatan tidak tersusun dengan baik meliputi buku rencana kegiatan, perintah operasi, rencana upacara pembukaan, acara paparan dan dukungan administrasi tidak optimal.

c. Tahap Pelaksanaan. Program Bakti TNI didalam pelaksanaannya terdapat keterbatasan terutama dalam hal dukungan anggaran yang diberikan oleh Komando Atas sangat kecil, bahkan ada kegiatan program yang tidak didukung oleh anggaran sama sekali seperti kegiatan TNI Manunggal KB dan Kesehatan. Dinamika dilapangan dirasakan adanya banyak hambatan dan kendala yang harus diatasi agar sasaran dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Keterbatasan dukungan yang ada, mengakibatkan Kowil sering bersandar kepada Pemda dan instansi yang terkait, agar kegiatan tersebut dapat berjalan. Hal ini sering mengalami hambatan karena adanya keterbatasan Pemda dan instansi terkait serta tidak adanya instruksi/petunjuk dari pusat terhadap kegiatan yang sifatnya lintas Kementrian. Kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan menyebabkan beberapa permasalahan yaitu :

- 1) Pencapaian target pada pelaksanaan belum sesuai dengan yang diharapkan karena dukungan administrasi yang ada tidak sesuai dengan beban pekerjaan dilapangan.
- 2) Dalam rangka mengatasi daerah yang telah terkena bencana, baik banjir maupun bencana alam yang berskala besar, satuan tidak memiliki peralatan berat, sehingga belum dapat melaksanakan secara cepat, karena harus melaksanakan koordinasi dengan pihak lain baik swasta maupun pemerintah untuk dapat memberikan bantuan peralatan tersebut. Selain itu dihadapkan dengan daerah yang terpencil atau sulit untuk dijangkau dengan peralatan berat tersebut menjadi kendala yang sulit dihindari.
- 3) Satuan TNI yang bertugas melaksanakan Bakti TNI belum dilengkapi dengan sistem administrasi dan pengorganisasian yang khusus disiapkan untuk melaksanakan Bakti TNI, sehingga dalam pelaksanaannya kurang optimal.
- 4) Belum tertatanya program kegiatan penyelenggaraan karya Bakti TNI, sehingga sasaran yang dicapai kadang-kadang tidak sesuai dengan skala prioritas.
- 5) Dalam penyelenggaraan karya Bakti, Aparat teritorial kurang mengadakan koordinasi dengan masyarakat setempat, sehingga terkesan bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat menganggap bahwa hal tersebut hanya semata tugas aparat.

d. Tahap Purna Manunggal. Hasil yang telah dicapai pada pelaksanaan kegiatan Bakti TNI khususnya kegiatan fisik manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama karena kurangnya tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pemeliharaan hasil Bakti TNI serta tidak adanya upaya dari aparat

Kowil untuk menghimbau Pemda agar dilaksanakan peningkatan kualitas terhadap hasil kegiatan Bakti TNI.

11. Piranti Lunak. Piranti lunak merupakan pedoman yang sangat penting bagi aparat Komando Kewilayahan dan anggota TNI AD yang lainnya dalam melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial termasuk dalam menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI, sehingga apa yang dikerjakan tetap pada jalurnya dan tidak menyimpang dari tujuan semula. Saat ini masalah piranti lunak dibidang pembinaan teritorial yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bakti TNI dan pemberdayaan wilayah pertahanan dirasakan perlu segera dilakukan pembenahan sebagai berikut :

a. Secara Kualitas.

1) Secara konseptual produk operasional yang menjadi referensi penyelenggaraan Bakti TNI adalah buku petunjuk tentang Bakti TNI, petunjuk operasional seperti Juk Ter, Anpotwil , Anpot Han, Renbinter dan Progbinter yang bersifat tahunan. Dalam penyusunan konsepsi tersebut masih bersifat internal, setelah dibuat dan ditandatangani pimpinan sudah dianggap dapat dioperasionalkan secara terpadu dengan Pemda dan instansi terkait. Pada kenyataannya petunjuk operasional tersebut dalam aplikasinya sulit dilaksanakan, banyak hambatan dan kendala karena dalam proses penyusunan konsep tidak melibatkan instansi terkait, sehingga dapat dikatakan bahwa produk - produk operasional tersebut sifatnya hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi Komando Kewilayahan jika ada pemeriksaan.

2) Buku-buku petunjuk teknis tentang pembinaan teritorial belum seluruhnya direvisi menyesuaikan dengan kondisi saat ini dengan mempedomani kepada paradigma baru TNI terutama dalam hal pemberdayaan wilayah pertahanan dan kegiatan Bakti TNI. Disini masih banyak referensi yang secara konseptual/esensi masih berorientasi kepada

paradigma lama yang tentunya sudah tidak tepat dan sesuai lagi dengan alam demokrasi saat ini. Penjabaran dari buku-buku petunjuk teknis pembinaan teritorial belum banyak ditemui dan dibuat oleh aparat yang berwenang di daerah, belum ada kreativitas untuk membuat buku-buku praktis tentang kegiatan Bakti TNI dan pemberdayaan wilayah pertahanan yang mudah dicerna oleh anggota Komando Kewilayahan atau anggota TNI AD lainnya dengan bahasa yang cocok di daerah masing-masing. Hal ini tentunya kurang mendukung percepatan pencapaian kegiatan Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan itu sendiri.

b. Secara Kuantitas. Koramil selaku Komando Kewilayahan terdepan, umumnya belum mempunyai referensi – referensi yang mencukupi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Buku-buku referensi kebanyakan hanya di markas Kodim dan Koramil-Koramil kota, sedang Koramil-Koramil pedalaman buku-buku yang dimilikinya sangat terbatas. Kondisi demikian sangat tidak menguntungkan bagi Komando Kewilayahan dalam menyelenggarakan Binter karena bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan, dan dari segi pembinaan SDM bagi aparat Komando Kewilayahan tidak akan profesional.

12. Keterpaduan pelaksanaan kegiatan Bakti TNI. Keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan Bakti TNI dengan Pemerintah daerah belum maksimal, karena kerjasama dan koordinasi yang dilakukan antara TNI dengan pemerintah daerah dan instansi sektoral dalam penyelenggaraan Bakti TNI belum optimal. Hal ini tampak dari munculnya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

a. Kerjasama antara Pemerintah dengan TNI belum terlaksana dengan baik, karena masih adanya keragu-raguan dalam mengambil keputusan, akibat dari belum adanya kebijakan atau piranti lunak

yang mengatur secara jelas dan rinci tentang batas-batas kewenangan masing-masing.

b. Penentuan obyek yang akan dijadikan sasaran Bakti TNI di lapangan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

c. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan RTRW antara pemerintah daerah dengan Satuan Komando Kewilayahan belum berjalan dengan baik yang mana penyusunan RTRW pembangunan daerah lebih cenderung pada pendekatan kesejahteraan tanpa memandang pada pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH

13. Umum. Penyelenggaraan Bakti TNI pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai sarana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat di wilayah, guna mewujudkan kemandirian TNI-Rakyat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional sehingga proses pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan darat yang menjadi tugas TNI AD dapat berjalan optimal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan TNI AD khususnya Kowil untuk mewujudkan tujuan Bakti TNI tersebut. Beberapa faktor tersebut dapat berasal dari dalam institusi Kowil itu sendiri berupa kekuatan yang dapat dieksploitir guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan Bakti TNI dan kelemahan yang perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat penyelenggaraan Bakti TNI. Sementara itu faktor dari luar meliputi peluang yang perlu untuk dimanfaatkan serta kendala yang harus dapat dieliminir agar tidak berpotensi menimbulkan hambatan dalam rangka penyelenggaraan Bakti TNI.

14. Faktor Internal.

a. Kekuatan

1) Kowil jajaran TNI AD dari tingkat Kodam sampai dengan Babinsa telah tergelar sampai ke pelosok daerah memungkinkan bagi setiap aparat Kowil untuk lebih mengenal daerahnya masing-masing dan dapat memantau terhadap segala kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga bila ditemukan adanya kekurangan maka dapat dijadikan sebagai salah satu obyek penyelenggaraan Bakti TNI.

2) Tingkat pengalaman aparat Kowil dalam penyelenggaraan Bakti TNI sudah cukup memadai, mengingat setiap satuan Kowil telah menyusun dan

melaksanakan kegiatan Program Bakti TNI secara terencana dan menjadi rutinitas memungkinkan setiap aparat untuk mengetahui berbagai hambatan yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan Bakti TNI, sehingga kegiatan evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan Bakti TNI dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

3) Daya gerak yang ditopang dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi dan kondisi fisik yang prima dari aparat Kowil hasil binaan dari latihan yang dilaksanakan secara teratur di satuan merupakan kekuatan yang harus dapat diberdayakan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Bakti TNI khususnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik berupa pembangunan sarana dan infrastruktur di daerah yang menjadi salah satu obyek kegiatan Bakti TNI.

4) Penyusunan program kerja satuan Kowil didasarkan pada sistem "*bottom up planning*", dimana Komando atas menyerap kebutuhan satuan yang ada di bawahnya merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Kowil untuk menyusun program kegiatan Bakti TNI guna mendapatkan persetujuan dari komando atas sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan Bakti TNI yang akan dilaksanakan Kowil.

b. Kelemahan.

1) Sikap dan perilaku oknum aparat Kowil yang masih belum sepenuhnya mencerminkan jati dirinya sebagai prajurit TNI, karena masih timbul adanya arogansi aparat yang cenderung menimbulkan sikap antipati dari sebagian masyarakat terhadap TNI sehingga berpengaruh pada dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan Bakti TNI.

2) Alat peralatan yang dimiliki oleh satuan Kowil sebagai alat penunjang penyelenggaraan Bakti TNI sangat terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas berakibat pada kegiatan dilaksanakan seadanya dan dalam kondisi serba kekurangan berpengaruh pada pencapaian sasaran kegiatan Bakti TNI yang tidak maksimal.

3) Piranti lunak berupa buku-buku petunjuk pelaksanaan sampai dengan Protap Bakti TNI masih belum diadakan revisi untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi yang terjadi terkait dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Binter dan penyelenggaraan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan telah menimbulkan keraguan bagi satuan Kowil dalam penyelenggaraan Bakti TNI.

15. Faktor Eksternal.

a. Peluang.

1) Tugas-tugas TNI dalam OMSP sesuai dengan UU RI No.34 tahun 2004 tentang TNI diantaranya adalah menyelenggarakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang salah satu penjabarannya dilaksanakan ke dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan Bakti TNI, maka program Bakti TNI memiliki payung hukum yang jelas sehingga tidak akan menimbulkan resistensi di tengah-tengah masyarakat.

2) Guna menghadapi kompleksitas permasalahan dan intensitas penugasan yang sangat tinggi dihadapkan kepada keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi, maka unsur pimpinan TNI AD telah menentukan prioritas sasaran pembangunan salah satu adalah terlaksananya peningkatan kegiatan Bakti TNI yang dilaksanakan dengan Operasi Bakti TNI, berupa TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), TNI Manunggal Sejahtera (TMS), TNI Manunggal Pertanian

(TMP) dan TNI Manunggal Kesejahteraan Keluarga (TMKK), dan Karya Bakti TNI dalam bentuk Pekan Bakti TNI guna memperkokoh kemandirian TNI-Rakyat dalam upaya penyusunan pertahanan negara matra darat merupakan peluang bagi setiap satuan Kowil untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan Bakti TNI dan memungkinkan bagi Satuan Kowil untuk mendapatkan dukungan Komando atas terhadap setiap program Bakti yang akan digelar di daerahnya.

3) Penerimaan masyarakat dan instansi sektoral lainnya yang terkait di daerah terhadap hasil-hasil kegiatan Bakti TNI cukup besar dan telah dirasakan manfaat sepenuhnya bagi rakyat, memungkinkan bagi aparat Kowil untuk mendapatkan bantuan baik tenaga, dana maupun alat peralatan yang dibutuhkan untuk memperlancar penyelenggaraan Bakti TNI yang dilaksanakan Kowil.

4) Intensitas bencana baik bencana yang disebabkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi, gunung meletus, maupun bencana akibat ulah manusia seperti kebakaran hutan maupun tanah longsor akhir-akhir cenderung mengalami peningkatan berakibat pada kerusakan infrastruktur daerah dan bangunan-bangunan di daerah bencana dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan bagi Satuan Kowil untuk dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi melalui kegiatan Bakti TNI.

5) Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah terutama kekayaan alamnya merupakan peluang yang besar untuk dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Bakti TNI, sehingga

pemberdayaan wilayah pertahanan pada aspek sumber kekayaan alam alam dapat tercapai optimal.

b. Kendala.

- 1) Sosialisasi kebijakan pemerintah yang menyangkut dukungan anggaran bagi kegiatan Bakti TNI belum dilaksanakan secara menyeluruh sampai pada tingkat daerah Kabupaten, sehingga sering timbul adanya kesalahfahaman antara satuan Kowil yang akan melaksanakan Bakti TNI di daerah dengan instansi pemerintah di daerah yang berpengaruh pada kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Bakti TNI.
- 2) Kemampuan daya dukung daerah baik berupa dana, alat peralatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tidak sama, sehingga berpengaruh pada pemenuhan dukungan alat peralatan dan sarana penunjang kegiatan Bakti TNI lainnya.
- 3) Belum sinkronnya program Binter yang disusun oleh Kowil dengan program Pemda terutama menyangkut penyelenggaraan Bakti TNI sebagai akibat koordinasi yang belum terpadu antara Pemda dengan Kowil berdampak pada operasionalisasi kegiatan di lapangan menjadi tumpang tindih, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.
- 4) Pemekaran wilayah seiring adanya kebijakan otonomi daerah yang digulirkan pemerintah pusat menjadi kendala dalam hal koordinasi dengan timbulnya permasalahan batas tanggungjawab daerah, sehingga berpengaruh pada pembinaan yang dilaksanakan aparat Kowil termasuk dalam penentuan obyek dalam penyelenggaraan Bakti TNI.

BAB V

PENYELENGGARAAN BAKTI TNI YANG DIHARAPKAN

16. Umum. Mencermati uraian tentang kondisi penyelenggaraan Bakti TNI saat ini, pada hakekatnya TNI sebagai salah satu bagian dari komponen bangsa telah ikut berperan aktif untuk mendukung program pembangunan Nasional melalui serangkaian program kegiatan Bakti TNI yang menyentuh langsung pada kebutuhan hidup rakyat, namun hal tersebut belum dapat terlaksana secara optimal dan berakibat pada tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat yang menjadi tugas TNI AD belum dapat tercapai sepenuhnya. Oleh karenanya ke depan diperlukan pentahapan kegiatan Bakti TNI yang tersusun dengan baik sehingga penyelenggaraan Bakti TNI dapat lebih ditingkatkan, dan piranti lunak sebagai legalitas formal bagi Kowil harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta adanya peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan Bakti TNI terutama menyangkut koordinasi yang dilakukan antara Satuan Kowil dengan pemerintah daerah dan instansi sektoral lainnya di daerah.

17. Penyelenggaraan Bakti TNI. Binter pada dasarnya diarahkan untuk mendukung suksesnya Pembangunan Nasional melalui penyelenggaraan metoda Bakti TNI, Bintangwil/Binwanwil dan Komsos sehingga terwujudnya ketahanan masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam yang tangguh. Sedangkan dalam lingkup Sisbin TNI, Binter diarahkan untuk membentuk dan mewujudkan sikap teritorial pada setiap prajurit Angkatan Darat dalam rangka meningkatkan dan memelihara kemanunggalan TNI-Rakyat. Salah satu azas pelaksanaan Binter adalah adanya kesatuan komando, yaitu penyelenggaraan Binter dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang terkoordinasi di bawah satu komando serta azas manfaat, yaitu penyelenggaraan Binter harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di samping untuk kepentingan pertahanan negara. Mengacu pada hal tersebut diatas, maka penyelenggaraan Bakti TNI sebagai wujud pelaksanaan Binter dalam

prakteknya di lapangan harus dapat dilaksanakan secara terencana sehingga pelaksanaannya dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan oleh karenanya ke depan baik setiap tahapan kegiatan dalam penyelenggaraan Bakti TNI harus dapat dilakukan semaksimal mungkin yaitu :

a. Tahap Perencanaan. Pada tahapan pemilihan sasaran harus dirumuskan secara terpadu dengan unsur-unsur yang terkait baik pemerintah daerah maupun instansi sektoral, sehingga daerah Kowil yang dipilih sebagai sasaran Bakti TNI merupakan hasil kesepakatan bersama dan bukan merupakan pilihan dari Kowil sendiri. Selain pemilihan sasaran, dalam perencanaan penyelenggaraan Bakti TNI baik aparat Kowil, pemerintah daerah maupun instansi sektoral yang terkait dapat menyusun dan merumuskan secara bersama-sama mengenai jenis kegiatan, kebutuhan dana, tenaga, personel serta alat peralatan yang dibutuhkan secara matang, sehingga dalam pelaksanaannya tidak timbul lagi permasalahan kekurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Bakti TNI.

b. Tahap Persiapan. Tahap persiapan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan dengan kegiatan :

1) Rapat koordinasi teknis tingkat pusat. Dandim yang daerahnya ditetapkan menjadi obyek sasaran diundang dan menghadiri rapat koordinasi teknis di tingkat pusat.

2) menyiapkan administrasi kegiatan yang disusun dengan baik meliputi buku rencana kegiatan, perintah operasi, rencana upacara pembukaan, acara paparan dan dukungan administrasi tidak optimal.

c. Tahap Pelaksanaan. Melalui perencanaan yang matang pada saat tahapan kegiatan perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama antara aparat Kowil, pemerintah daerah dan instansi

sektoral lainnya yang terkait maka diharapkan pada tahap pelaksanaan semua pihak dapat melibatkan diri dan terjun langsung ke lapangan, sehingga dapat diketahui apabila terdapat kekurangan dan hambatan di lapangan terutama menyangkut anggaran yang harus dapat turun tepat waktu. Disamping itu hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Dan SSK yang terlibat dalam pelaksanaan Bakti TNI harus mempunyai target hasil kerja untuk sasaran fisik dan memprosentasikan hasil kerja yang telah dicapai.
- 2) Alat peralatan yang disiapkan harus sesuai dengan obyek sasaran yang dikerjakan dan dibentuk kelompok yang terdiri dari TNI dan masyarakat serta dikerjakan secara bahu membahu .
- 3) Sistem administrasi dan pengorganisasian yang khusus disiapkan untuk melaksanakan Bakti TNI perlu disusun di satuan-satuan Kowil, sehingga satuan yang diterjunkan untuk menyelenggarakan Bakti TNI sudah baku dan terjalin saling pengertian dan soliditas yang kuat diantara mereka untuk lebih mensukseskan penyelenggaraan setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Bakti TNI.
- 4) Program kegiatan penyelenggaraan karya Bakti TNI harus dapat tertata baik yang menyangkut waktu kegiatan, penentuan sasaran, kegiatan yang dilaksanakan, sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan skala prioritas.
- 5) Dalam operasionalisasinya di lapangan selama kegiatan Bakti TNI berlangsung, Aparat teritorial harus tetap menjaga dan mengadakan koordinasi dengan masyarakat setempat, sehingga timbul adanya perasaan dalam diri masyarakat bahwa kehadirannya sangat dibutuhkan untuk

terlibat secara aktif dalam kegiatan Karya Bakti maupun Operasi Bakti yang dilaksanakan. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, maka akan timbul suatu kesadaran dan sikap saling membutuhkan diantara masyarakat dan aparat Kowil sehingga Kemanunggalan TNI – Rakyat dapat terwujud.

d. Tahap Purna Manunggal. Selama ini permasalahan yang selalu dihadapi adalah hasil yang dilaksanakan dalam kegiatan Bakti TNI terutama menyangkut kegiatan pemeliharaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya kesadaran dari Pemerintah daerah maupun masyarakat akan pentingnya upaya pemeliharaan dilakukan. Untuk itulah, aparat Kowil hendaknya dapat menjadi pelopor dalam kegiatan pemeliharaan hasil Bakti TNI serta senantiasa dapat menjaga rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan dari masyarakat melalui pemberian contoh dan teladan dalam sikap hidup sehari-hari. Apabila hal tersebut dapat ditunjukkan, secara lambat laun akan tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat untuk juga melakukan hal yang sama yakni memelihara hasil-hasil dari kegiatan Bakti TNI serta senantiasa dapat menjaga rasa cintanya terhadap tanah air dan bangsa.

18. Piranti Lunak. Piranti lunak berkaitan dengan ketersediaan dan validitas buku-buku petunjuk maupun Protap-protap yang dimiliki oleh satuan Kowil sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar tugasnya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh Komando atas dan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu baik secara kualitas maupun kuantitas, piranti lunak-piranti lunak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bakti TNI maupun teknis pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan harus tersedia dan dapat dioperasikan sesuai kemampuan dan batas kemampuan satuan.

a. Secara Kualitas.

1) Secara konseptual produk operasional harus dapat dilaksanakan oleh aparat Kowil dan dapat diterima oleh instansi sektoral yang terkait di daerah bukan hanya sekedar

untuk memenuhi persyaratan administrasi Komando Kewilayahan jika ada pemeriksaan.

2) Buku-buku petunjuk teknis tentang pembinaan teritorial harus sudah direvisi dan disesuaikan dengan kondisi saat ini dengan menjelaskan lebih detail tentang teknis pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kegiatan Bakti TNI serta sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

b. Secara Kuantitas. Secara kuantitas, buku-buku petunjuk dan protap yang telah tersusun harus dapat disosialisasikan dan didistribusikan sampai pada Koramil-Koramil dan Babinsa di daerah pedalaman, sehingga dapat menjamin bahwa setiap pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai aturan dan dapat mengeliminir adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang telah digariskan Komando atas.

19. Keterpaduan pelaksanaan kegiatan Bakti TNI. Dalam pelaksanaan kegiatan Bakti TNI sering diabaikan tentang pentingnya keterpaduan dalam melakukan setiap perencanaan maupun tindakan yang dilakukan, sehingga berakibat pada pencapaian kegiatan yang kurang maksimal. Untuk itu, ke depan diharapkan hal tersebut tidak terjadi lagi. Masing-masing pihak baik aparat Kowil, pemerintah daerah maupun instansi sektoral lainnya yang terkait harus dapat memegang teguh azas kesetaraan dan keterpaduan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan Bakti TNI, sehingga tujuan pemberdayaan wilayah pertahanan darat yaitu agar seluruh upaya pengelolaan potensi nasional yang diselenggarakan oleh jajaran Angkatan Darat khususnya Kowil bersama komponen bangsa lainnya mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Untuk itu diharapkan :

a. Kerjasama antara Pemerintah dengan TNI dapat terlaksana dengan baik, dimana pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat dengan dilandasi oleh kebijakan atau piranti lunak yang

secara jelas dan rinci mencantumkan batas-batas kewenangan masing-masing.

b. Penentuan obyek yang akan dijadikan sasaran Bakti TNI di lapangan harus dapat dilaksanakan secara maksimal dan terkoordinasikan dengan baik oleh aparat Kowil, Pemerintah daerah dan instansi sektoral lainnya yang terkait.

c. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan RTRW antara pemerintah daerah dengan Satuan Komando Kewilayahan dapat berjalan dengan baik, dimana penyusunan RTRW pembangunan harus dapat disinkronkan dengan RUTR Pertahanan yang telah disusun oleh Kowil, sehingga pendekatan kesejahteraan dapat dilakukan seimbang dengan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan.

BAB VI

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BAKTI TNI

20. Umum. Pemberdayaan wilayah pertahanan darat dalam rangka mengembangkan sishanta merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terus menerus oleh TNI – AD dan segenap komponen bangsa lainnya, agar mempunyai kemampuan pertahanan darat sebagai penyangga dan penindak segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang mengancam integritas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bakti TNI sebagai salah satu metode Pembinaan Teritorial merupakan sarana yang efektif untuk mendukung tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat, sehingga penyelenggaraannya perlu lebih dioptimalkan. Oleh karena itu guna terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan Bakti TNI sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat di masa yang akan datang, perlu dirumuskan berbagai upaya dan langkah-langkah pengembangan yang menyangkut peningkatan kegiatan penyelenggaraan Bakti TNI dalam setiap tahapan, penyusunan buku-buku petunjuk serta peningkatan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bakti TNI dengan Pemerintah dan instansi sektoral lainnya melalui kerjasama lintas sektoral TNI dengan Kementrian/Non Kementrian.

21. Tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam perumusan optimalisasi penyelenggaraan Bakti TNI ini adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kegiatan pada setiap tahapan dalam menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat.
- b. Menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI secara optimal sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat di daerah.
- c. Mewujudkan aturan/tatanan hukum tentang penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan darat sebagai pedoman Kowil dalam pelaksanaan kegiatan Bakti TNI.

Comment [USER1]:

d. Mewujudkan suatu keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bakti TNI dengan Pemerintah dan instansi sektoral lainnya.

22. Sasaran. Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Terwujudnya pelaksanaan setiap tahapan yang baik dan optimal dalam menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

b. Terselenggaranya tahapan-tahapan kegiatan Bakti TNI secara optimal sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat di daerah.

c. Terwujudnya aturan/tatanan hukum berupa buku-buku petunjuk dan protap-protap yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan darat sebagai pedoman Kowil dalam pelaksanaan kegiatan Bakti TNI.

d. Terwujudnya kerjasama lintas sektoral TNI dengan Pemerintah daerah dan dengan Kementrian/Non Kementrian sehingga dapat menjamin adanya keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bakti TNI.

23. Subyek.

a. Kasad.

1) Mengeluarkan kebijakan program pembangunan dan pembinaan bagi Satuan Kowil dalam rangka peningkatan profesionalisme Aparat Kowil.

2) Menyusun program Bakti TNI yang ditujukan untuk memperkuat kemandirian TNI-Rakyat, sehingga muncul kesadaran yang tulus dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan pertahanan negara matra darat, dengan

Comment [USER2]:

kegiatan operasi bakti, karya bakti, bantuan kemanusiaan, dan bakti sosial.

b. Pangdam. Pengembangan rencana operasi pertahanan (Renopshan) Kodam, maka Pangdam memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penentuan terhadap kebijaksanaan menyangkut penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan darat di wilayahnya.
- 2) Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait di tingkat Provinsi sehingga mempunyai kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.
- 3) Mengkoordinasikan dengan pejabat Muspida dan instansi terkait serta tokoh masyarakat di tingkat propinsi agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Bakti TNI.
- 4) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah sehingga tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan.

c. Danpusterad. Dalam kapasitasnya sebagai pembina teknis Teritorial memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan kebijaksanaan Kasad dibidang pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan matra darat.
- 2) Menjabarkan kebijaksanaan Kasad dibidang Bakti TNI dan pemberdayaan wilayah pertahanan darat dalam penyiapan piranti lunak.
- 3) Melaksanakan sosialisasi kebijakan Kasad di bidang petunjuk induk pemberdayaan wilayah pertahanan darat terhadap Satuan Kewilayahan.

4) Menyelenggarakan asistensi dan pengawasan kesatuan jajaran Komando Kewilayahan atas pelaksanaan penyelenggaraan Bakti TNI.

5) Melaksanakan pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan Bakti TNI yang dilaksanakan satuan jajarannya.

6) Melaporkan hasil pelaksanaan asistensi dan evaluasi penyelenggaraan Bakti TNI dan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan darat kepada Kasad.

d. Danpusdikter. Sebagai Komandan di lembaga pendidikan teritorial TNI AD memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1) Melakukan pembinaan terhadap kurikulum pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Teritorial agar dapat memuat materi-materi yang mengarah pada dinamika tugas prajurit Komando Kewilayahan antara lain penambahan materi pelajaran tentang Bakti TNI dan pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

2) Memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kepada prajurit-prajurit Satuan Komando Kewilayahan agar memiliki tingkat pengetahuan dan kemampuan bidang ke-Teritorialan yang memadai, sehingga memiliki kesiapan operasional yang tinggi pada saat melaksanakan setiap tugas yang diberikan satuannya dalam melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial termasuk dalam menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

e. Danrem.

1) Danrem dalam menyusun Rencana Pemberdayaan Wilayah Pertahanan berdasarkan Rencana dan Program Kodam sebagai Konsep dasar bagi penyelenggaraan

pembinaan teritorial, Renstra Binter tingkat Korem dijabarkan kedalam analisa Binter tingkat Kodim. Khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan darat tingkat Korem.

2) Danrem membantu Pangdam dan sebagai perantara dalam mengkoordinasikan dengan pejabat Muspida dan instansi terkait serta tokoh masyarakat di tingkat propinsi dengan pejabat Muspida dan instansi terkait serta tokoh masyarakat di tingkat kabupaten yang ada di wilayahnya agar dapat mendukung kegiatan Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

3) Menghimpun, mengklasifikasi data geografi, demografi, kondisi sosial dari tiap – tiap Kodim.

4) Membuat RUTR Wilhan tingkat Korem berdasarkan data dari Kodim dan telah disinkronkan dengan RTRW.

5) Mensinergikan kekuatan dan kemampuan yang ada dari Kodim jajarannya meliputi personel dan materiil sehingga mampu diberdayakan untuk penyelenggaraan Bakti TNI.

d. Dandim. Dandim merupakan Komandan satuan kewilayahan yang bertanggung jawab secara langsung dalam membina dan meningkatkan kemampuan prajuritnya agar dapat melaksanakan tugasnya termasuk dalam menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

1) Mengkoordinasikan dengan pejabat Muspida dan instansi terkait serta tokoh masyarakat secara terus menerus di tingkat kabupaten dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bakti TNI.

2) Merencanakan, menyusun dan menyiapkan RUTR Wilhan yang dipadukan dengan Renbangda serta menyusun

Program Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

- 3) Menyiapkan, melatih dan meningkatkan kemampuan anggotanya agar siap ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI.
- 4) Menyiapkan perlengkapan dan materilil yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan Bakti TNI.
- 5) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bakti TNI untuk menyiapkan daya tangkal dan kemampuan perlawanan wilayah serta meningkatkan kemanunggalan antara TNI-Rakyat.
- 6) Menyelenggarakan komunikasi sosial dengan seluruh komponen masyarakat di wilayahnya guna mendukung kemanunggalan TNI – Rakyat.
- 7) Menyusun dan mengajukan rencana operasi Bakti / karya Bakti TNI ke komando atas sesuai permintaan Pemda.
- 8) Menghimpun, mengevaluasi data geo, demo, komsos, penentuan sasaran yang menjadi prioritas dan mengkoordinasikan pada Pemda dan instansi terkait, melalui rapat Muspida dan Rakorbangda Tkt. II seperti penentuan sasaran TMMD, TMK, TMR dan sebagainya serta pemutahiran data, selanjutnya melaporkan ke Kodam / Korem.
- 9) Membuat laporan secara periodik setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan kepada Danrem.

24. Obyek.

- a. Personel.** Aparat Kowil sebagai Sumber daya manusianya yang senantiasa harus meningkatkan keterampilan maupun

pengetahuannya di bidang teritorial, sehingga dapat memadukan kegiatan Binter dan melaksanakan kegiatan Bakti TNI secara optimal.

b. Materiiil. Sebagai komponen pendukung baik alat komunikasi, alat peralatan maupun kendaraan yang perlu senantiasa ada untuk mendukung penyelenggaraan Bakti TNI yang dilaksanakan Kowil.

c. Piranti Lunak. Sebagai pedoman pelaksanaan Bakti TNI baik berupa Buku-Buku Petunjuk berupa Bujukin, Bujuknik dan Bujuklak senantiasa diadakan revisi dan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi masyarakat yang daya kritis semakin meningkat, serta referensi lain yang berkaitan dengan bidang teritorial sebagai penunjang pelaksanaan tugas bagi Aparat Kowil dalam upayanya menyelenggarakan Bakti TNI.

25. Metoda.

a. Koordinasi. Koordinasi merupakan metoda yang digunakan untuk menjamin terwujudnya suatu kerjasama dan kesamaan visi dan persepsi sehingga tercapai suatu sinergi yang positif dari masing-masing instansi terkait baik TNI maupun instansi lintas sektoral dalam penyelenggaraan Bakti TNI.

b. Pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan dan evaluasi merupakan metoda yang digunakan untuk menjamin bahwa kegiatan Bakti TNI yang diselenggarakan oleh Kowil sesuai dengan perencanaan yang telah tersusun, serta melalui evaluasi dapat menjamin adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI.

c. Pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi Aparat Kowil melalui pembekalan ilmu pengetahuan bidang teritorial sehingga dapat mendukung terselenggaranya kegiatan Bakti TNI.

d. Latihan. Latihan merupakan metoda untuk meningkatkan keterampilan aparat Kowil yang dilaksanakan secara berjenjang, bertahap dan berkesinambungan di satuan sehingga memiliki kesiapan operasional yang tinggi dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

e. Regulasi. Regulasi ini berkaitan dengan upaya melakukan penataan terhadap piranti lunak baik berupa aturan/tatanan hukum seperti per-Undang-Undangan maupun buku-buku petunjuk dan Protap yang diperlukan oleh Kodim untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Bakti TNI.

26. Sarana dan Prasarana.

a. Sarana.

1) Piranti lunak yang berisikan doktrin, peraturan, prosedur tetap, buku petunjuk dan buku lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberdayaan wilayah pertahanan darat dan penyelenggaraan Bakti TNI.

2) Alat Peralatan. Alat peralatan seperti Alat Komunikasi yang dapat digunakan baik milik organik TNI, Pemda, swasta dan milik masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan dan koordinasi dalam pelaksanaan dan pelaporan sehingga kegiatan dapat berjalan lancar, serta Alat Angkutan dan alat peralatan lainnya untuk mendukung kegiatan Bakti TNI.

3) Anggaran berupa pemenuhan alokasi dana dari Komando atas untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan yang diperlukan dalam operasionalisasi kegiatan Bakti TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat yang dilaksanakan oleh Satuan Kowil.

b. Prasarana.

1) Bangunan perkantoran berupa kantor Kodim, Koramil dan kantor Pemda serta kantor instansi terkait.

- 2) Lembaga pendidikan yaitu pusat pendidikan yang ada dibawah Kodiklat TNI AD dan Rindam jajaran Kodam.

27. Upaya yang Dilaksanakan.

a. Optimalisasi Penyelenggaraan Bakti TNI. Bakti TNI sebagai salah satu metode Binter dilaksanakan secara terus menerus yang terdiri dari Operasi Bakti dan Karya Bakti guna terwujudnya Kemanunggalan TNI – Rakyat. Agar penyelenggaraan Bakti TNI dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada kegiatan pentahapan yang diawali dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan purna manunggal.

1) Tahap Perencanaan.

- a) Pada tahapan pemilihan sasaran baik fisik maupun sasaran non fisik dalam kegiatan Bakti TNI yang digabungkan dan dikembangkan dengan Program Kementrian/Non Kementrian pada kegiatan Operasi Bakti termasuk rencana anggaran dirumuskan secara terpadu dengan unsur-unsur yang terkait serta mempertimbangkan keinginan dan kepentingan masyarakat.
- b) Pada tingkat Pusat, PJO melakukan koordinasi dengan Kementrian/Non Kementrian dalam menyusun perencanaan kegiatan Bakti TNI, agar program-program Kementrian/Non Kementrian yang dapat dipadukan dengan kegiatan bakti untuk satu tahun ke depan dapat diprogramkan dimasing-masing Kementrian/Non Kementrian, sehingga program Bakti TNI sudah masuk dalam alokasi anggaran Kementrian.Non Kementrian. Untuk itu diperlukan peran aktif PJO bersama Kementrian/Non Kementrian

untuk berkoordinasi dengan Bappenas guna penurunan alokasi anggaran untuk kegiatan Bakti TNI di masing-masing Kementerian/Non Kementerian.

c) Setelah adanya penentuan daerah yang dijadikan sasaran Bakti TNI pada tingkat PJO, maka PJO selanjutnya memberikan petunjuk kepada PKO, diteruskan kepada PKP dan selanjutnya Dansatgas menyiapkan rencana kegiatan Bakti TNI dengan mengidentifikasi masalah dan mencari daerah sasaran sesuai rencana pembangunan daerah melalui proses "botom up", yaitu proses perumusan pembangunan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa sampai dengan kabupaten/kota, yang memenuhi aspek kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat untuk pertahanan negara dan dapat dikerjakan melalui Bakti TNI. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain meliputi :

(1) Penentuan Daerah sasaran dengan memperhatikan kriteria-kriteria aspek kesejahteraan (desa kritis, daerah terpencil dan terisolir, daerah miskin, daerah yang terkena bencana alam, maupun daerah terbelakang), serta aspek stabilitas daerah (rawah ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya dan rawan stabilitas keamanan).

(2) Penentuan kegiatan fisik dan non fisik. Setelah ditemukan daerah sasaran yang akan dijadikan obyek kegiatan Bakti TNI yang akan datang, selanjutnya merinci obyek kegiatan/sasaran Bakti TNI baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

(a) Kegiatan Fisik yang berupa perbaikan/pembuatan jalan desa, pembuatan jalan baru antar desa, pembuatan jembatan permanen atau semi permanen, perbaikan atau pembuatan rumah ibadah, pembuatan saluran irigasi, MCK, Pos Keamanan, penambahan pohon untuk penghijauan, rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak dan lain sebagainya.

(b) Kegiatan Non Fisik yang berupa penyuluhan pertanian, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan bela negara dan cinta tanah air, penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pelatihan Hansip/Wanra, Pembinaan Perlawanan rakyat dan pemutaran film-film sejarah untuk hiburan rakyat.

(3) Pengajuan kepada Pemda Kabupaten. Setelah Dandim menyusun obyek sasaran dalam beberapa alternatif dan diajukan serta dipaparkan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah dalam suatu rapat untuk mendapat persetujuan, Pengajuan obyek sasaran Bakti TNI diupayakan 2 tahun sebelum kegiatan dilaksanakan guna memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan menyiapkan dukungan kebutuhan. Dan perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diajukan harus mampu diselesaikan oleh SSK dalam waktu yang tersedia.

(4) Mengajukan rencana kegiatan ke PKP/PKO. Rencana kegiatan Bakti TNI yang berisi daerah dan obyek sasaran diajukan oleh Dandim kepada Danrem selaku PKP yang selanjutnya diajukan ke PKO sampai ke PJO untuk mendapat persetujuan sebagai rencana kegiatan Bakti TNI definitif.

2) Tahap Persiapan. Tahap persiapan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Bakti TNI dengan kegiatan.

a) Rapat Koordinasi Teknis tingkat Pusat. Dandim yang daerahnya ditetapkan menjadi obyek sasaran Bakti TNI menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bakti TNI di tingkat Pusat dalam rangka membahas rencana kegiatan sasaran secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait.

b) Menyiapkan administrasi Bakti TNI antara lain pembuatan Buku Rencana kegiatan Bakti TNI, pembuatan perintah Operasi Bakti TNI, Rencana Upacara Pembukaan Bakti TNI, acara Paparan, serta menghimpun dukungan administrasi lainnya yang diterima baik dari PJO, dari instansi lain maupun dukungan dari Pemda Kabupaten/Kota.

c) Menyiapkan Personel yang terlibat dalam Satuan Tugas. Dandim menyusun personel yang terlibat dalam nominatif Satuan Tugas sesuai kemampuan satuan, instansi dan bidang tugas dengan kegiatan :

(1) Penyiapan SSK dengan kegiatan :

(a) Dandim berkoordinasi dengan Dansat Non Kowil yang ada di wilayahnya untuk menyiapkan personel setingkat SSK.

(b) Dandim memberikan pengarahan tentang tugas yang harus dilaksanakan, keadaan daerah sasaran, kebiasaan-kebiasaan adat setempat, nama tokoh masyarakat dan sebagainya.

(c) Selanjutnya Dandim mengecek kesiapan personel maupun perlengkapan kerja termasuk bivak SSK.

(d) Dan Ru ke atas SSK meninjau daerah dasaran dan lokasi obyek sasaran fisik/non fisik.

(2) Menyiapkan personel lainnya.

(a) Dandim berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayahnya tentang pelibatan personel guna mendukung Bakti TNI.

(b) Dandim menyampaikan tentang tugas yang dibebankan kepada personel dan instansi lainnya.

(c) Dandim mengecek kesiapan materiil.

(3) Menyiapkan pengerahan rakyat yang berada di sekitar lokasi Bakti TNI mengenai tanggung jawab Babinsa, penggiliran keikutsertaan masyarakat sebagai pendukung,

penyiapan dukungan makan atau ekstra feeding dan pemanfaatan tokoh informasi leader di masyarakat, serta penetapan aturan tata tertib lainnya yang harus dipedomani oleh masyarakat dalam kegiatan Bakti TNI yang dilaksanakan.

(4) Menyiapkan sarana pendukung antara lain pendirian Posko SSK, bivak pasukan SSK, tempat upacara, dan pergeseran pasukan.

3) Tahap Pelaksanaan. Bakti TNI yang selama ini telah dilaksanakan dari tahun 1980 diseluruh wilayah Indonesia pada akhirnya menjadikan rutinitas biasa dan belum menampakkan hasil yang signifikan baik dalam bentuk kegiatan fisik maupun non fisik. Untuk kegiatan fisik, hasil-hasil yang telah dikerjakan oleh kegiatan Bakti TNI sebagian besar tidak ditindaklanjuti oleh Pemda baik pengembangannya maupun pemeliharannya sehingga banyak yang menjadi rusak kembali. Untuk kegiatan non fisik belum ada ukuran sebagai pedoman keberhasilan kegiatan non fisik. Bagi personel TNI yang dilibatkan dalam kegiatan Bakti TNI menjadikan hal rutinitas sehingga menimbulkan rasa jenuh. Adapun upaya pengembangan kegiatan Bakti TNI yang perlu dilaksanakan antara lain :

a) Untuk kegiatan fisik melakukan koordinasi dengan Pemda agar menindaklanjuti dan mengembangkan hasil kegiatan Bakti TNI diwilayah masing-masing dan mempertajam sasaran-sasaran yang akan dikerjakan oleh kegiatan Bakti TNI terutama yang menyangkut aspek pengembangan ekonomi wilayah, desa tertinggal, desa perbatasan, daerah miskin perkotaan.

b) Kegiatan non fisik dilaksanakan upaya pengembangan dengan menggunakan metode-metode penyuluhan yang disesuaikan karakter budaya masing-masing daerah digabung bersama hiburan sehingga menarik animo masyarakat.

c) Perlu dikeluarkan pola-pola baru untuk mendukung kegiatan Bakti TNI yang disesuaikan dengan perkembangan situasi saat ini, diprioritaskan pada sasaran strategis dan menyentuh langsung kegiatan masyarakat sehingga hasil yang dicapai bisa lebih fundamental.

4) Tahap Purna Manunggal. Untuk dapat menjamin kesempurnaan pelaksanaan Bakti TNI perlu dilaksanakan tahap purna manunggal dengan kegiatan pembuatan laporan, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan hasil kegiatan dengan penekanan

a) Laporan agar disusun secara lengkap meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan dan pencapaian sasaran disertai dengan dokumentasi.

b) Melaksanakan evaluasi mulai dari tahap perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan yang dinilai negatif dan mempengaruhi kegiatan sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan Bakti TNI selanjutnya.

c) Menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memelihara dan meningkatkan hasil kegiatan Bakti TNI sehingga dapat dirasakan dan dinikmati serta dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemampuan pertahanan darat.

b. Penyusunan dan revisi Aturan/tatanan hukum tentang penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

Comment [USER3]:

Untuk memberikan pemahaman kepada aparat Kowil tentang aturan-aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 tentang kewajiban bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka perlu diadakan kegiatan pengadaan buku-buku petunjuk lapangan dan teknis pelaksanaan Bakti TNI dan pemberdayaan wilayah pertahanan bagi Satkowil, antara lain dapat dilakukan melalui :

- 1) Penyusunan Aturan/tatanan hukum sebagai pedoman penyelenggaraan Bakti TNI bagi TNI serta melakukan revisi terhadap Buku-buku petunjuk yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi saat ini.
- 2) Perumusan dan penyusunan buku-buku petunjuk yang mengatur tentang penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan darat.
- 3) Sosialisasi buku-buku petunjuk yang mengatur tentang penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan darat kepada seluruh aparat Kowil dalam bentuk penerbitan buku saku.
- 4) Menyusun buku saku tentang disiplin, tugas, peran dan fungsi Personel satuan komando kewilayahan, sebagai pedoman bagi setiap personel satuan komando kewilayahan dalam melaksanakan fungsinya di lapangan.

c. Peningkatan Keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bakti TNI dengan Pemerintah. Agar kerjasama antara Pemerintah dengan TNI dapat terlaksana dengan baik, serta didukung oleh adanya kebijakan atau piranti lunak yang

mengatur secara jelas dan rinci tentang batas-batas kewenangan masing-masing sehingga keragu-raguan dalam mengambil keputusan dapat teratasi, maka upaya yang perlu dilaksanakan adalah :

- 1) Menyusun Rancangan Undang-undang pemberdayaan wilayah pertahanan, segenap aspek dalam tri gatra dan panca gatra sehingga dapat diberdayakan untuk kepentingan sistem pertahanan semesta.
- 2) Menyusun Doktrin teritorial atau kewilayahan yang sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, sehingga setiap aparat komando kewilayahan tidak ragu-ragu melaksanakan fungsi pembinaan teritorial.
- 3) Menyusun buku petunjuk tentang mekanisme hubungan antara pimpinan satuan terhadap pimpinan pemerintah daerah setempat, sebagai pedoman pelaksanaan tata kerja yang lebih konkrit sehingga setiap kebijakan pembangunan yang diambil oleh pimpinan daerah dapat sejalan dengan RUTR pertahanan yang direncanakan oleh pimpinan satuan komando kewilayahan. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah daerah didalam pembuatan Rencana Umum Tata Ruang tidak hanya di tinjau dari segi kesejahteraan saja akan tetapi juga dapat ditinjau dari segi pertahanan oleh sebab itu :
 - a) Didalam pembuatan RTRW, Pemerintah daerah hendaknya menggunakan Konsultan dari dalam daerah sendiri sehingga Konsultan tersebut lebih memahami keadaan wilayah daerah tersebut, baik dari segi Geografi, Demografi maupun kondisi sosial dari masyarakatnya.

- b) Didalam pembuatan RTRW, Pemerintah daerah Hendaknya mengikut sertakan Komando kewilayahan sehingga dapat memberikan masukan terhadap pembangunan dari aspek Pertahanan.
 - b) Pejabat Pemerintah Daerah mau menerima masukan-masukan dari Komando kewilayahan tentang pembuatan RTRW dari aspek Pertahanan.
- 4) Menyusun buku petunjuk tentang kewenangan satuan komando kewilayahan dengan pemerintah daerah setempat, memberikan batasan yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam mengeluarkan kebijakan.
- 5) Peningkatan kegiatan kerjasama antara TNI dengan Pemerintah di daerah dalam menyusun perencanaan sasaran kegiatan Bakti TNI Dengan memanfaatkan keberadaan Rakorbang. Dalam hal ini Kasdim selaku ketua Rakorbang di wilayah Kabupaten/Kota, hendaknya dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah agar Rakorbang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah sebelum pelaksanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan hendaknya dapat berorientasi untuk kepentingan pertahanan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

BAB VII

P E N U T U P

28. Kesimpulan.

a. Bakti TNI merupakan salah satu metode yang dinilai efektif untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kemandirian TNI dengan Rakyat, serta dalam upaya memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa guna menjaga Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia . Namun dalam implementasinya penyelenggaraan Bakti TNI belum mencapai hasil yang optimal, hal ini disebabkan karena pelaksanaan setiap tahapan pada kegiatan Bakti TNI belum dilaksanakan secara, piranti lunak belum lengkap, serta Keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bakti TNI dengan pemerintah daerah belum maksimal.

b. Agar penyelenggaraan Bakti TNI mampu mencapai hasil yang optimal maka perlu ditempuh langkah optimalisasi dengan meningkatkan kegiatan pada setiap tahapan Bakti TNI, latihan dan penataran, penyamaan visi dan misi tentang penyelenggaraan Bakti TNI, penyusunan protap-protap penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan darat, serta peningkatan kerjasama antara aparat Kowil dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya dengan harapan melalui Bakti TNI dapat mencapai sasaran yang telah disusun yakni terwujudnya kemandirian TNI dengan rakyat.

c. Dengan adanya upaya ke arah yang lebih baik dengan berbagai langkah yang disesuaikan dengan aturan dan norma yang diberlakukan, baik terhadap peran dan fungsi dari Kowil itu sendiri melalui penyamaan visi, misi dan persepsi, maupun kinerja Aparat Kowil melalui peningkatan lima kemampuan teritorial serta kegiatan Bakti TNI melalui Operasi Bakti dan Karya Bakti yang dilaksanakan pada intinya adalah untuk merebut hati rakyat dengan bersikap dan berperilaku baik terhadap rakyat sehingga timbul simpati rakyat

terhadap TNI sehingga mendorong terwujudnya Kemanunggalan TNI-Rakyat. Kondisi ini akan melahirkan kekuatan sinergis yang diperlukan bagi upaya-upaya untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan darat yang menjadi tugas dari Kowil.

31. Saran.

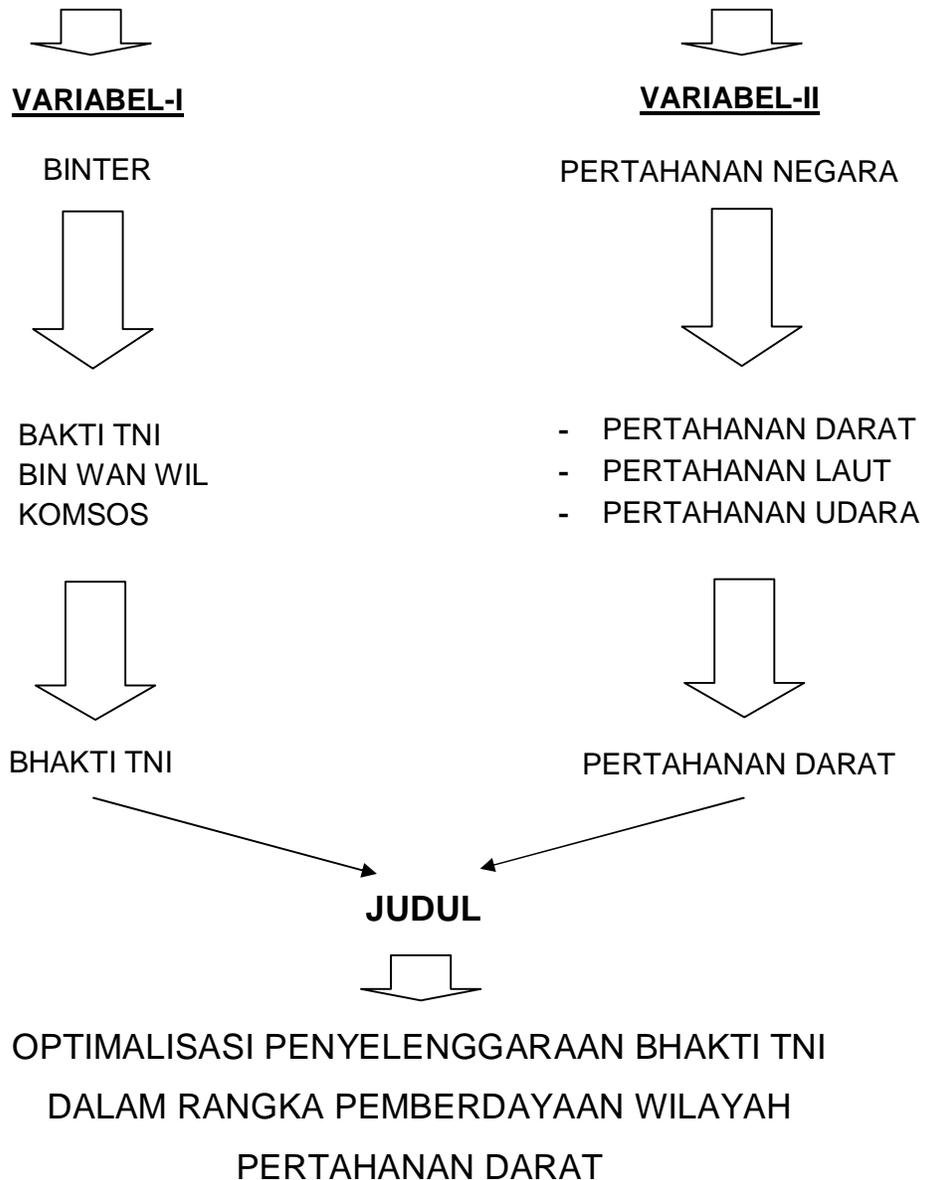
- a. Perlu adanya peningkatan kegiatan pada setiap tahapan pada Bakti TNI sehingga tersusun dengan cermat sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Perlu adanya kegiatan pendidikan, latihan dan penataran yang dilaksanakan di satuan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan bagi aparat Kowil yang menyangkut materi Bakti TNI.
- c. Perlu adanya revisi dan penyusunan piranti lunak berupa buku-buku petunjuk dan Protap-protap penyelenggaraan Bakti TNI dan penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan darat.

Balikpapan, Maret 2011
Penulis

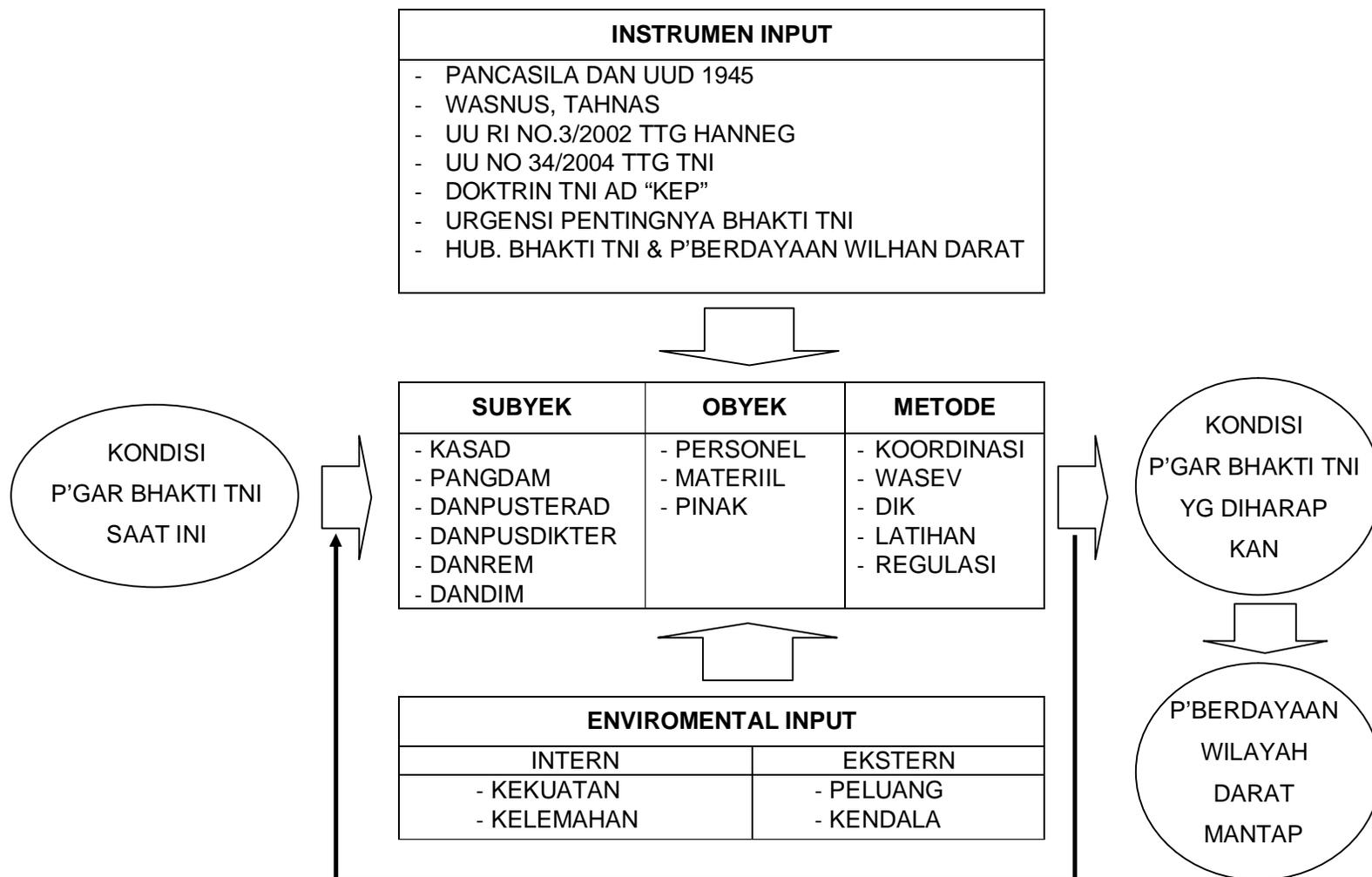
Tang upe
Lettu Cpl NRP 11050023700479

PROSES PENENTUAN JUDUL PROPOSISI NO.4

" TUGAS TNI AD DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN
DIDARAT MELALUI **BINTER** MERUPAKAN PERWUJUDAN
OPERASI MILITER SELAIN PERANG GUNA MENDUKUNG
PERTAHANAN NEGARA "



POLA PIKIR



DAFTAR PUSTAKA

I. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. AMANDEMEN UUD 1945 (SINAR GRAFIKA). JAKARTA, 2000.
2. UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA, PT.FOKUSMEDIA, BANDUNG, 2004.
3. UNDANG-UNDANG NO.34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, PT.FOKUS MEDIA, BANDUNG, 2004.

II. BUKU ILMIAH

YANDIANTO, DRS. KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA, PENERBIT M2S BANDUNG, SEPTEMBER 2001,

III. DOKTRIN TNI.

" DOKTRIN KARTIKA EKA PAKSI TNI AD".

IV. PENERBITAN LEMBAGA PEMERINTAH/SWASTA

1. MABESAD, BUKU PETUNJUK TEKNIK TENTANG BHAKTI TNI, SKEP KASAD NOMOR SKEP/480/XII/2004 TANGGAL 22 DESEMBER 2004, JAKARTA, 2004.
2. MABESAD, BUKU INDUK TENTANG PEMBINAAN TERITORIAL, SKEP KASAD, NOMOR : SKEP/98/V/2007 TANGGAL 16 MEI 2007, JAKARTA, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Tang Upe
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pajalesang, 07 April 1979
3. Pangkat/Korps/NRP : Lettu Cpl NRP 11050023700479
4. Agama : Islam
5. Alamat : Asrama Sudirman Blok K1 No. 59 Balikpapan
6. Pendidikan :
 - a. Umum :
 - 1) SD Th. 1991
 - 2) SMP Th. 1994
 - 3) SMA Th. 1997
 - 4) Perguruan Tinggi Th. 2003
 - b. Militer/Bang Um :
 - 1) Semapa PK Th. 2005
 - 2) Sesarcab Pal Th. 2006
 - 3) Diklapa I Th. 2010
 - c. Militer/Bang Spes :
 - 1) Suspatih Th. 2006
 - 2) Sussa Jepang Th. 2007
 - 3) Suspa Disposal Munisi Th. 2009
7. RIWAYAT JABATAN :
 - 1) Paur Was Um Siwas Th. 2006
 - 2) Kaur Inven dan Anev Th. 2008

Demikian Riwayat Hidup Singkat ini saya buat dengan sebenarnya.